

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 (tiga) landasan utama meliputi : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dalam rangka akuntabilitas diatas, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Luwu Utara dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama tahun 2023, sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja tahun 2023. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja yang menjadi tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) di Indonesia.

Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) merupakan modal utama yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, visi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik adalah Mewujudkan Tata Kelola Telekomunikasi, Media, Informatika dan Statistik Yang Berkualitas dan Merata.

Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik adalah Meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatnya dan berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatnya pengelolaan informasi dan dokumentasi publik pemerintah daerah, meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam setiap pengambilan keputusan dan

pelaksanaannya terhadap pembuatan regulasi, penguatan kelembagaan dan SDM, pemenuhan infrastruktur, pemilihan aplikasi sistem informasi, peningkatan perencanaan dan keamanan informasi.

Dasar Hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Profil Kelembagaan

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu Dinas Perangkat Otonomi Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

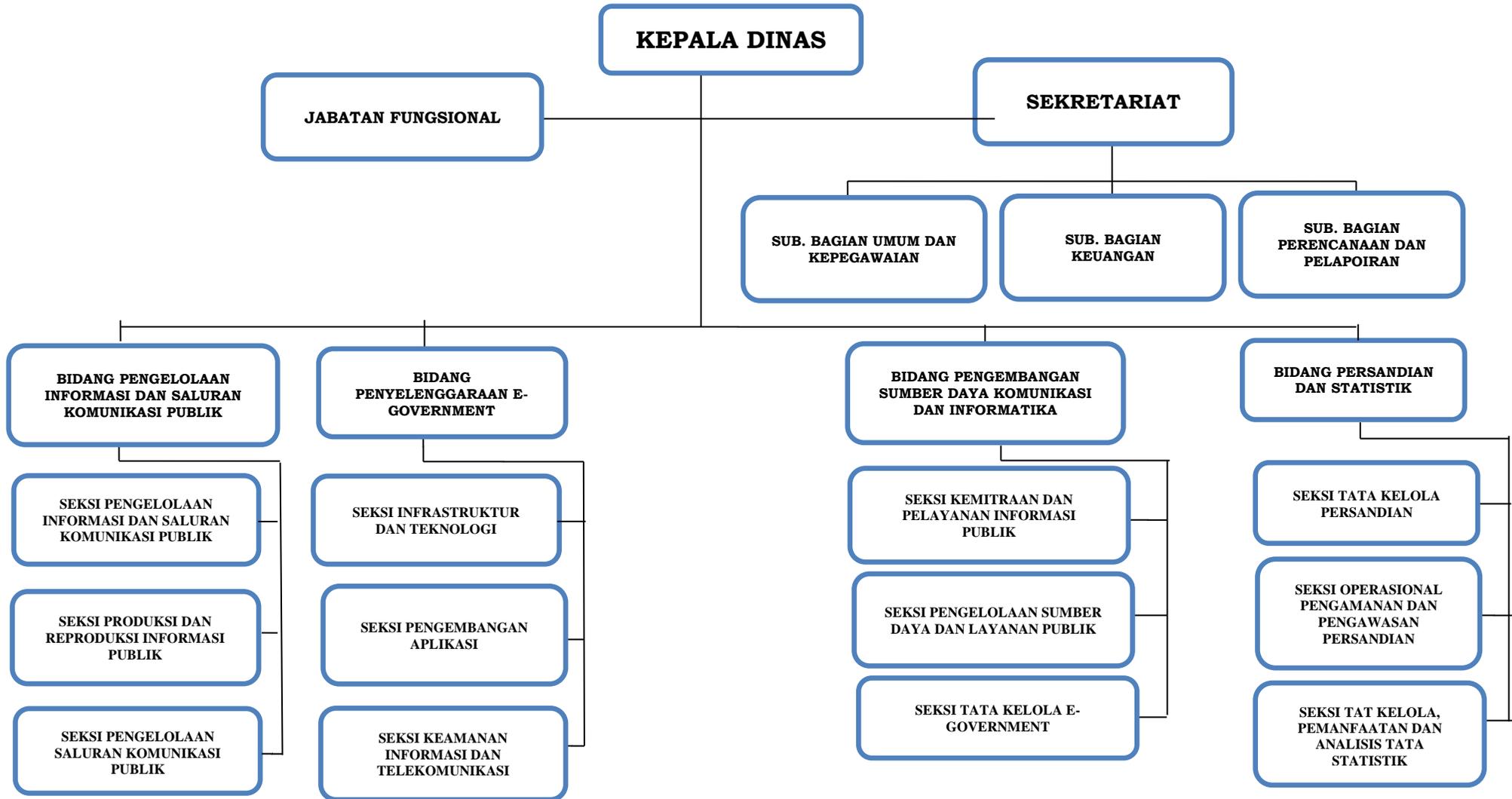
2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan, urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik

- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

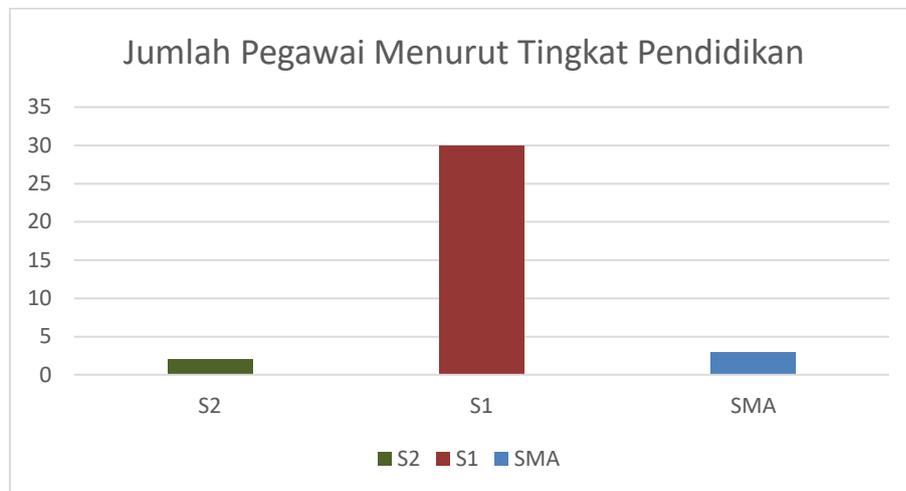
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUWU UTARA**



C. Profil Sumber Daya Manusia

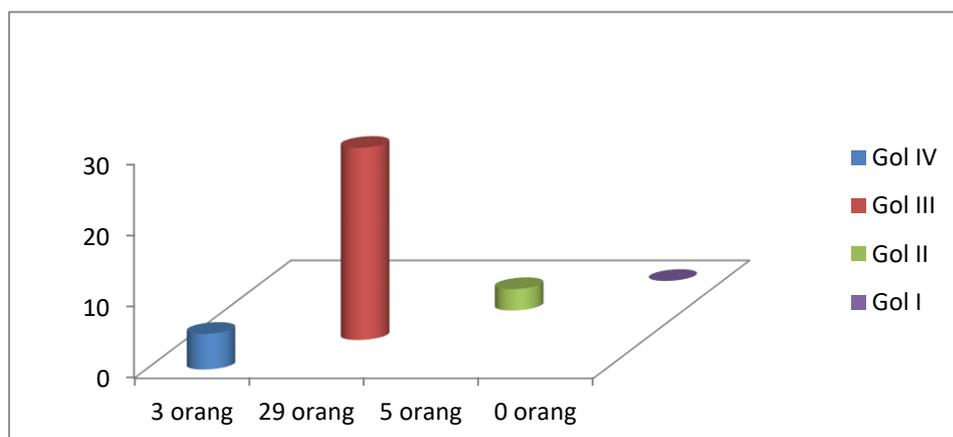
Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Luwu Utara yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

a) Menurut Tingkat Pendidikan :



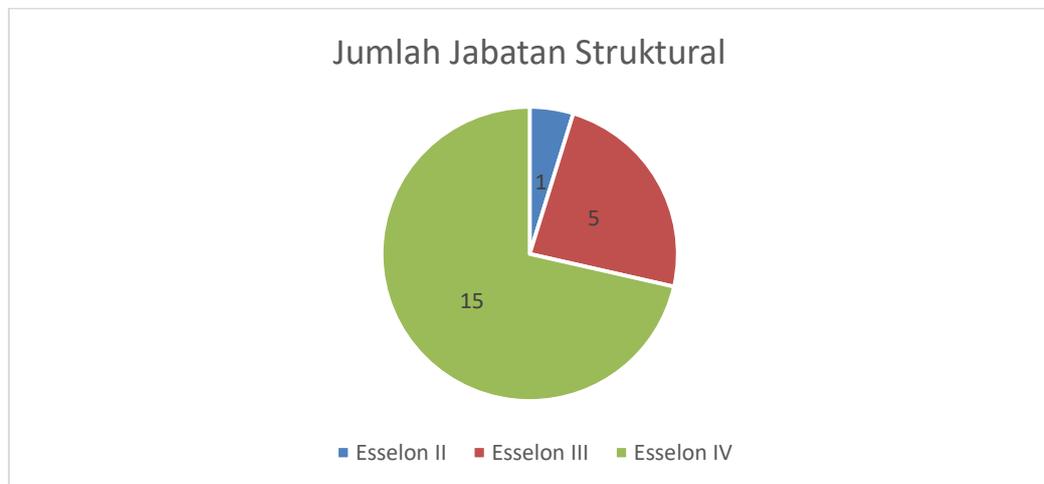
Dari 35 orang pegawai negeri sipil pada Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, jumlah aparat dengan tingkat pendidikan S2 berjumlah 2 (dua) orang atau 5,4%. Sedangkan aparat dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 30 orang atau 81,08%. Adapun jumlah aparat dengan tingkat pendidikan SMA berjumlah 3 orang.

b) Menurut Kepangkatan Dan Golongan



Jumlah aparat Golongan IV berjumlah 5 (lima) orang atau 14,3%. Sedangkan aparat Golongan III berjumlah 27 orang atau 77,14%. Adapun jumlah aparat dengan tingkat Golongan II berjumlah 3 orang atau 8,56%.

c) Menurut Jabatan Struktural :



Jumlah Pejabat Struktural sebanyak 21 aparat terdiri dari 1 (satu) orang eselon II, 5 (lima) orang eselon III dan 15 orang eselon IV. Sisanya sebanyak 16 aparat, terbagi habis sebagai staf pada sekretariat dan pejabat fungsional pada 4 bidang Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Luwu Utara.

D. Profil Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, penganggaran kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 sebesar Rp 6.296.262.000,- dengan rincian sebagai berikut :

U R A I A N	Rencana anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3
Belanja Operasi	6.242.562.000,00	99,15
Belanja Modal	53.700.000,00	0,85

E. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh

Pelaksanaan dan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari dalam maupun dari luar organisasi.

- a) Berbagai macam peraturan perundang-undangan baik skala nasional sampai pada tingkat daerah yang berpengaruh dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan, merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas, masih menimbulkan berbagai persepsi dalam pelaksanaannya, sehingga kadang-kadang menimbulkan pro dan kontra dalam melaksanakan tugas.
- b) Aparat selaku pelaksana kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik juga sangat berpengaruh terhadap kualitas capaian kinerja. Diperlukan peningkatan kualitas aparat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya baik melalui pelatihan dan pendidikan maupun melalui rekrutmen aparat ditinjau dari segi kuantitas. Peningkatan kualitas yang dimaksud terutama dalam penguasaan operasionalisasi teknologi informasi, karena saat ini, organisasi akan sulit bersaing dalam memberikan pelayanan, yang akan berdampak pada peningkatan pembangunan daerah. Pemahaman aparat akan pentingnya tugas pokok yang dilaksanakan juga merupakan dasar dari kedisiplinan pelaksanaan tugas. Apabila aparat kurang memahami tujuan dari pelaksanaan tugasnya maka akan berpengaruh dari hasil pekerjaannya yang juga pada akhirnya akan berdampak dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c) Penggunaan teknologi informasi sangat menunjang dan memiliki peranan yang vital terhadap pencapaian target kinerja. Teknologi informasi pada era informasi sekarang ini, perlu dimaksimalkan, terutama telah banyak produk-produk elektronik yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, baik oleh pelaksana maupun penerima manfaat.
- d) Sarana dan prasarana pendukung kegiatan juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Banyaknya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, akan mengakibatkan organisasi terlihat boros dalam penganggaran. Untuk menekan penggunaan anggaran maka diperlukan pemeliharaan dan perawatan yang baik terhadap sarana dan prasarana yang ada, sehingga dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama.

- e) Terbatasnya anggaran juga menjadi permasalahan tersendiri dalam pengembangan organisasi. Dengan rasio kebutuhan organisasi dengan alokasi penganggaran yang tidak seimbang akan memperlambat laju pencapaian sasaran tujuan organisasi. Oleh karena itu dibutuhkan kecermatan dalam menentukan skala prioritas organisasi.
- f) Dukungan pimpinan juga sangat diperlukan, berupa komitmen penuh sebagai motivator dan pendorong peningkatan kinerja aparat. Penghargaan dan sanksi (reward and punishment) perlu diterapkan untuk meningkatkan gairah dan semangat kerja aparat. Walaupun demikian penerapannya harus memperhatikan konsistensi dan berlaku untuk semua aparat tanpa memandang latar belakang status baik sosial maupun jabatan yang diamanatkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan program dan kegiatan strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik terangkum dalam Renstra Tahun 2016 – 2021. Dimana program yang telah ditentukan merupakan program-program unggulan dan menjadi prioritas SKPD sesuai dengan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Dalam Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan kinerja merupakan langkah awal untuk penilaian pengukuran kinerja.

Perencanaan strategis sangat terkait dengan sumber daya manusia untuk dapat memenuhi keinginan *stakeholder* dengan menjawab tentang perkembangan lingkungan baik nasional maupun global.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara mempunyai visi, misi, tujuan sasaran, program dan kegiatan.

Visi menggambarkan kemana suatu organisasi akan dibawa, sedang misi menggambarkan posisi organisasi saat ini.

Visi Dan Misi

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kab. Luwu Utara, dalam dokumen RPJMD program pembangunan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, persandian dan Statistik adalah:

1. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Selain program kegiatan yang direncanakan dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, direncanakan pula beberapa terobosan yang diharapkan akan memberikan daya ungkit tinggi bagi percepatan pencapaian sasaran pembangunan, antara lain:

1. Penguatan “Command Center” melalui penguatan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK Pemerintah.
2. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur yang unggul dibidang telekomunikasi, media dan informatika.
3. Peningkatan regulasi, kelembagaan, aplikasi sistem informasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, media dan informatika yang baik.

4. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam setiap pengambilan kebijakan tata kelola telekomunikasi, media dan informatika.

Dari rumusan program dan kegiatan yang terangkum dalam RPJMD menjadi salah satu dasar untuk merencanakan program yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Penjabaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2021 – 2026 disusun suatu rencana kinerja setiap tahunnya. Ini merupakan penjabaran Target Kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaannya.

Untuk mempertajam pencapaian visi misi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam mendukung Visi Misi Kepala Daerah maka dilaksanakan cascading guna menetapkan tujuan dan sasaran SKPD beserta indikator masing-masing sasaran. Adapun sasaran dimaksud beserta indikatornya tertuang ke dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, yakni:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Penyebarluasan Komunikasi dan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	hasil perhitungan indeks keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Prov. Sulawesi Selatan	- Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Meningkatnya Tingkat Kematangan Domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE	Tingkat Kematangan Domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE	Level	Hasil perhitungan indeks SPBE oleh Kemenpan RB	- Bidang Penyelenggaraan Aplikasi Informatika
Meningkatnya Publikasi Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral Yang di Publikasi pada Media Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	Jumlah Data Statistik Sektoral yang di publish dibagi jumlah total data statistik sektoral dikali 100%	- Bidang Statistik
Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang menyelenggarakan keamanan informasi pemerintah daerah	Persen	Jumlah OPD yang melaksanakan keamanan informasi dibagi jumlah seluruh OPD	- Bidang Persandian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	- Sekretariat

B. Perjanjian Kinerja

Agar sasaran yang ditetapkan tersebut dapat terukur pencapaiannya maka ditetapkan indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2023. Adapun Indikator Kinerja tersebut menjadi perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yakni sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyebarluasan Komunikasi dan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Badan Publik (KIP)	Indeks	87
2.	Meningkatnya Tingkat Kematangan Domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE	Tingkat Kematangan Domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE	Level	3
3.	Meningkatnya Publikasi Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral Yang di Publikasi pada Media Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	100
4.	Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang menyelenggarakan keamanan informasi pemerintah daerah	Persen	100
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Nilai	BB (70-79,9)

	<u>PROGRAM</u>	<u>ANGGARAN</u>	<u>KET</u>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.642.702.000,-	APBD
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 917.086.200,-	APBD
3	Program Aplikasi Informatika	Rp. 1.551.366.800,-	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 88.235.200,-	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 76.206.800,-	APBD
TOTAL ANGGARAN		Rp 6.275.597.000,00,-	

Adapun kegiatan penunjang pencapaian masing-masing target kinerja adalah sebagai berikut:

Indikator 1 : Indeks Keterbukaan Informasi Badan Publik (KIP)

Kegiatan :

No	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Indikator	
			Output	Target
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	271/667.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen
2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	158.404.600	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen
3	Pelayanan Informasi Publik	62.269.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen

No	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Indikator	
			Output	Target
1	2	3	4	5
4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	424.745.600	Jumlah Dukumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam menyebarluaskan informasi program dan kegiatan	1 Dokumen

Indikator 2 : Meningkatnya Tingkat Kematangan Domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE

Kegiatan :

No	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Indikator	
			Output	Target
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah	150.948.000	Jumlah Dokumen Hail Penyelenggaraan sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen
2	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	96.042.000	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	10 Aplikasi
3	Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah	97.678.800	Jumlah layanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah	18 Layanan

No	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Indikator	
			Output	Target
1	2	3	4	5
			daerah	
4	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	1.176.698.000	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	1 Dokumen
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	30.000.000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen

Indikator 3 : Meningkatkan Publikasi Data Statistik Sektoral

Kegiatan :

No	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Indikator	
			Output	Target
1	2	3	4	5
1	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	46.381.000	Jumlah dokumen Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1 Dokumen
2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	41.854.200	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	45 Orang

Indikator 4 : Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
Kegiatan :

No	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Indikator	
			Output	Target
1	2	3	4	5
1	Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah	37.946.400	Jumlah Laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah	1 Laporan
2	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota secara elektronik dan non elektronik	38.260.400	Jumlah laporan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota secara elektronik dan non elektronik	1 Laporan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Luwu Utara tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan indikator kinerja dengan realisasinya.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Luwu Utara telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab dari 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan. Perolehan capaian indikator kinerja terhadap 5 (lima) sasaran tersebut selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Penyebarluasan Komunikasi dan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Badan Publik (KIP)	Indeks	87	89,11	102,42%
Meningkatnya Tingkat Kematangan Domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE	Tingkat Kematangan Domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE	Level	3	3	100%
Meningkatnya Publikasi Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral Yang	Persen	100	100	100%

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	di Publikasi pada Media Informasi Publik Pemerintah Daerah				
Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang menyelenggarakan keamanan informasi pemerintah daerah	Persen	100	100	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Nilai	70	64,65	92,36%

Untuk indikator pertama yakni **Indeks Keterbukaan Informasi Badan Publik (KIP)**, Pada tahun 2023, penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan mengalami perubahan indikator dan metode penilaian. Yakni 40 indikator pada tahun 2021 bertambah menjadi 158 indikator di tahun 2022. Dengan berbagai penyesuaian yang telah dilakukan, nilai indeks KIP Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi **89,11** dan menjadi yang **tertinggi kedua di Sulawesi Selatan**.

Indikator kedua yakni **Tingkat Kematangan Domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE** Pada Tahun 2023 Nilai PBE Kabupaten Luwu Utara sebesar **3,18**; menjadi yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan tingkat kematangan masing-masing domain rata-rata berada pada **level 3**.

Indikator ketiga yakni **Persentase Data Statistik Sektoral Yang di Publikasi pada Media Informasi Publik Pemerintah Daerah**, Pada tahun 2023, jumlah data statistik sektoral sebanyak 135 jenis data. Seluruh data telah dipublikasi pada Website Pemerintah Daerah, Web PPID dan melalui Buku Statistik Sektoral Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023.

Indikator keempat yakni **Persentase OPD yang menyelenggarakan keamanan informasi pemerintah daerah**. Pada tahun 2023 seluruh OPD telah menyelenggarakan keamanan informasi pemerintah daerah, baik Tandatanganan Elektronik (TTE), Jaring Keamanan Sandi (JKS), ataupun Pengacak signal (Jammer).

Indikator kelima yakni **Nilai SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**. Pada tahun 2023, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara yakni 64,65 dengan kategori predikat B (Baik).

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik pada tahun 2023 mengalami penurunan pada indikator **Nilai SAKIP**. Sedangkan untuk 4 (empat) indikator lainnya yakni **Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Tingkat Kematangan Domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE, Persentase Data Statistik Sektoral Yang di Publikasi pada Media Informasi Publik Pemerintah Daerah, Persentase OPD yang menyelenggarakan keamanan informasi pemerintah daerah**. Adapaun capaian kinerja terhadap 5 (lima) sasaran tersebut di bandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya terlihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI					KET
			2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Penyebarluasan Komunikasi dan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Badan Publik (KIP)	Indeks	89,93	80,50	95,80	81,21	89,11	Pada Tahun 2022 Penghitungan Indeks KIP menggunakan Indikator dan Metode Baru yakni 158 indikator
Meningkatnya Tingkat Kematangan Domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE	Tingkat Kematangan Domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE	Level	2	2	3	3	3	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI					KET
			2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Publikasi Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral Yang di Publikasi pada Media Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	92,84	89,93	100	100	100	
Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang menyelenggarakan keamanan informasi pemerintah daerah	Persen	2,85	2,85	3,84	100	100	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI					KET
			2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Nilai	57,90	67,57	69,49	70,24	64,65	Pada Tahun 2023 Penghitungan Nilai SAKIP menggunakan Indikator dan Metode Baru

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya terlihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)					KET
		2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Penyebarluasan Komunikasi dan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Badan Publik (KIP)	96,7	84,74	100,84	95,54%	102,42%	
Meningkatnya Tingkat Kematangan Domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE	Tingkat Kematangan Domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE	100%	100%	100%	100%	100%	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)					KET
		2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Publikasi Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral Yang di Publikasi pada Media Informasi Publik Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang menyelenggarakan keamanan informasi pemerintah daerah	2,85	2,85	3,84	100	100%	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	96,5	112,61	99,27	100,34	92,36%	Pada Tahun 2023 Penghitungan Nilai SAKIP menggunakan Indikator dan Metode Baru

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Rencana Jangka Menengah

Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kominfo periode 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2021-2026. Adapun capaian kinerja dinas dibandingkan dengan rencana jangka menengah yang tertuang dalam dokumen renstra adalah sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KINERJA TAHUN 2023	TARGET 2026 (RENSTRA)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Penyebarluasan Komunikasi dan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Badan Publik (KIP)	Indeks	89,11	94	94,80%
Meningkatnya Tingkat Kematangan Domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE	Tingkat Kematangan Domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE	Level	3	4	75%
Meningkatnya Publikasi Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral Yang di Publikasi pada Media Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100%

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KINERJA TAHUN 2023	TARGET 2026 (RENSTRA)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang menyelenggarakan keamanan informasi pemerintah daerah	Persen	100	100	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Nilai	64,65	80,00	80,81%

Untuk indikator pertama yakni **Indeks Keterbukaan Informasi Badan Publik (KIP)**, Capaian tahun 2023 terhadap target renstra adalah sebesar 94,80%; penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan mengalami perubahan indikator dan metode penilaian. Yakni 40 indikator pada tahun 2021 bertambah menjadi 158 indikator di tahun 2022. Diharapkan indeks KIP Kabupaten Luwu Utara dapat terus ditingkatkan.

Indikator kedua yakni **Tingkat Kematangan Domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE**, capaian indikator ini terhadap target Renstra pada tahun 2023 sebesar 100%; Nilai SPBE Kabupaten Luwu Utara sebesar **3,18**; menjadi yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan tingkat kematangan masing-masing domain rata-rata berada pada **level 3**.

Indikator ketiga yakni **Persentase Data Statistik Sektoral Yang di Publikasi pada Media Informasi Publik Pemerintah Daerah**, capaian indikator ini terhadap target Renstra pada tahun 2023 sebesar 100%; jumlah data statistik sektoral sebanyak 135 jenis data. Seluruh data telah dipublikasi pada Website Pemerintah Daerah, Web PPID dan melalui Buku Statistik Sektoral Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023.

Indikator keempat yakni **Persentase OPD yang menyelenggarakan keamanan informasi pemerintah daerah**. capaian indikator ini terhadap target Renstra pada tahun 2023 sebesar 100%; Seluruh OPD telah menyelenggarakan keamanan informasi pemerintah daerah, baik Tandatangani Elektronik (TTE), Jaring Keamanan Sandi (JKS), ataupun Pengacak signal (Jammer).

Indikator kelima yakni **Nilai SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**. capaian indikator ini terhadap target Renstra pada tahun 2023 sebesar 80.81%; Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara yakni 64,65 dengan kategori predikat B (baik).

Adapun capaian realisasi kinerja Dinas Kominfo dengan target RPJMD Kabupaten Luwu Utara digambarkan pada tabel sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,2	3,18

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada tahun 2023 tidak terlepas dari banyak faktor yang menyebabkan peningkatan ataupun penurunan kinerja. Berikut penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan terhadap masing-masing indikator:

- Indikator “***Indeks Keterbukaan Informasi Badan Publik (KIP)***”

Faktor yang mempengaruhi tercapainya target :

- Meningkatnya ketersediaan data dan informasi dari seluruh OPD yang dipublikasikan melalui berbagai platform, baik itu media cetak, website, maupun media sosial;
- Tersedianya fitur-fitur tambahan pada Website PPID Kabupaten Luwu Utara mampu meningkatkan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat

- Indikator “***Tingkat Kematangan Domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE***”

Faktor yang mempengaruhi tercapainya target :

- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pra-Mandiri indeks SPBE dengan inovasi “*Si Modis*”
- Dokumen Rencana Induk Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah mengalami revisi yang disesuaikan dengan peraturan terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal ini mempengaruhi domain kebijakan SPBE pemerintah. Adapun dokumen yang dimaksud penyusunannya dilakanakan pada Tahun Anggaran 2021.

- Indikator “***Persentase Data Statistik Sektoral Yang di Publikasi pada Media Informasi Publik Pemerintah Daerah***”

Faktor yang mempengaruhi tercapainya target :

- Adanya kerjasama dengan BPS Kab. Luwu Utara dalam penyediaan dan publikasi data primer;
- Dukungan stakeholders seluruh OPD dalam penyediaan data sektoral masing-masing sektor.

- Indikator “***Persentase OPD yang menyelenggarakan keamanan informasi pemerintah daerah***”

Faktor yang mempengaruhi tercapainya target :

- Terlaksananya kegiatan jaring komunikasi sandi dalam pengiriman dan penerimaan berita;
- Dukungan seluruh stakeholders dalam penerapan Tanda Tangan Elektronik.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada tahun 2023 tidak terlepas dari dukungan sumber daya yang disediakan, dalam hal ini anggaran. Berikut analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) terhadap masing-masing indikator:

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)				TINGKAT EFISIENSI
				POKOK	PERUBAHAN	REALISASI	%	
Meningkatnya Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	89,11	102,42%	917.086.200	874.125.300	873.754.261	99,96	Efisien
Meningkatnya Tingkat Kematangan Domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE	Level	3	100%	1.551.366.800	1.453.505.800	1.436.830.237	98,85	Efisien
Meningkatnya Publikasi Data Statistik Sektoral	Persen	100	100%	88.235.200	39.706.000	35.167.400	88,57	Efisien
Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100%	76.206.800	70.721.500	70.655.580	99,91	Efisien

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)				TINGKAT EFISIENSI
				POKOK	PERUBAHAN	REALISASI	%	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai	64,65	92,36%	3.642.702.000	3.858.203.400	3.681.563.118	95,42	Kurang Efisien

- Indikator “*Indeks Keterbukaan Informasi Badan Publik (KIP)*”, Capaian Kinerja sebesar 102,42%, lebih tinggi dibandingkan persentase realisasi anggaran sebesar 99,96%; Ini berarti penggunaan anggaran untuk indikator ini tergolong *Efisien*;
- Indikator “*Tingkat Kematangan Domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE*”, Capaian Kinerja sebesar 100%, lebih tinggi dibandingkan persentase realisasi anggaran sebesar 98,85%; Ini berarti penggunaan anggaran untuk indikator ini tergolong *Efisien*;
- Indikator “*Persentase Data Statistik Sektoral Yang di Publikasi pada Media Informasi Publik Pemerintah Daerah*”, Capaian Kinerja sebesar 100%, lebih tinggi dibandingkan persentase realisasi anggaran sebesar 88,57%; Ini berarti penggunaan anggaran untuk indikator ini tergolong *Efisien*;
- Indikator “*Persentase OPD yang menyelenggarakan keamanan informasi pemerintah daerah*”, Capaian Kinerja sebesar 100%, lebih tinggi dibandingkan persentase realisasi anggaran sebesar 99,91%; Ini berarti penggunaan anggaran untuk indikator ini tergolong *Efisien*;
- Indikator “*Nilai SAKIP OPD*”, Capaian Kinerja sebesar 92,36%, lebih rendah dibandingkan persentase realisasi anggaran sebesar 95,42%; Ini berarti penggunaan anggaran untuk indikator ini tergolong *Kurang Efisien*;

6. Analisis/Evaluasi Program/Kegiatan

Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara tahun 2023 tentu sangat dipengaruhi oleh pencapaian target-target program dan kegiatan yang dilaksanakan. Realisasi program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Capaian : Persentase capaian penunjang urusan pemerintahan daerah

Target : 100%

Realisasi : 100%

- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Capaian : Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Target : 100%

Realisasi : 100%

Faktor Pendukung keberhasilan kegiatan:

1. Komitmen pimpinan dalam menjalankan target-target perencanaan;
2. Koordinasi yang baik dengan seluruh bidang lingkup Dinas Kominfo.

Faktor Penghambat:

1. Pemahaman aparatur terhadap peraturan-peraturan terkait perencanaan dan pelaporan kinerja;
2. Padatnya permintaan data/informasi terkait perencanaan dan pelaporan.

Solusi Penyelesaian Masalah:

1. Koordinasi dengan stakeholders perencanaan dan pelaporan;
2. Pembagian tugas yang jelas kepada aparatur yang menangani perencanaan dan pelaporan.

- **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Capaian : *Persentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*

Target : 100%

Realisasi : 100%

Faktor Pendukung keberhasilan program:

1. Komitmen pimpinan dan tanggung jawab aparatur dalam peningkatan kapasitas aparatur;
2. Koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Faktor Penghambat:

1. Ketersediaan anggaran terkait peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
2. Kesungguhan aparat dalam mengikuti bimbingan teknis yang diikuti.

Solusi Penyelesaian Masalah:

1. Pemilihan jenis Bimbingan Teknis yang dianggap sangat mendesak dan penting untuk diikuti;

2. Meminta pertanggungjawaban dalam bentuk laporan dan sosialisasi terhadap aparat yang mengikuti Bimbingan Teknis

- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Capaian : Persentase capaian Administrasi Umum perangkat daerah

Target : 100%

Realisasi : 100%

Faktor Pendukung keberhasilan kegiatan:

1. Komitmen pimpinan dan tanggung jawab aparatur dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengadaan barang dan jasa.

Faktor Penghambat:

1. Jumlah aparat yang memahami prosedur pengadaan barang dan jasa masih kurang;
2. Aturan terkait pengadaan barang dan jasa yang cenderung berubah-ubah.

Solusi Penyelesaian Masalah:

1. Mengikutsertakan aparatur kominfo pada kegiatan bimtek maupun sosialisasi terkait pengadaan barang dan jasa
2. Berkoordinasi dengan LPSE terkait pengadaan barang jasa lingkup Dinas Kominfo

- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Capaian : Persentase capaian jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Target : 100%

Realisasi : 100%

Faktor Pendukung keberhasilan kegiatan:

1. Komitmen pimpinan dan tanggung jawab aparatur dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Pemahaman aparat dalam implementasi peraturan terkait pelayanan administrasi perkantoran.

Faktor Penghambat:

1. Jumlah aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi perkantoran masih kurang;

Solusi Penyelesaian Masalah:

1. Pengaturan tugas masing-masing aparat baik ASN maupun Non ASN
2. Membuat time schedule pelaksanaan kegiatan

- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**

Capaian : Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah

Target : 100%

Realisasi : 100%

Faktor Pendukung keberhasilan kegiatan:

1. Pendataan aset/barang milik daerah yang baik;
2. Penggunaan aset/barang milik daerah yang sesuai dengan fungsi.

Faktor Penghambat:

1. Kuantitas barang yang terbatas membuat penggunaannya yang cenderung dipaksakan;
2. Keterampilan pengguna yang masih terbatas dalam hal pemeliharaan barang milik daerah.

Solusi Penyelesaian Masalah:

1. Pembagian peralatan kantor disesuaikan dengan kuantitas kegiatan pada masing-masing bidang.

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Capaian : Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik

Target : 100%

Realisasi : 100%

- **Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Capaian : Jumlah Media Pengelolaan Informasi Publik

Target : 7 Jenis

Realisasi : 7 Jenis

Faktor Pendukung keberhasilan program:

1. Pemanfaatan berbagai media penyebarluasan informasi;
2. Tersedianya sumber daya aparatur penyebarluasan informasi.

Faktor Penghambat:

1. Pembagian tugas dan tanggungjawab dengan Bagian Protokol setdakab. Luwu Utara yang masih tumpang tindih;
2. Penyampaian kegiatan dari beberapa OPD yang cenderung terlambat.

Solusi Penyelesaian Masalah:

1. Berkoordinasi dengan Bagian Protokol terkait pembagian peran, tugas dan tanggung jawab;
2. Berkoordinasi dengan OPD terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui PPID.

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

*Capaian : Persentase OPD Yang Menggunakan Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo
Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi*

*Target : 100%
72,22%*

*Realisasi : 100%
76,47%*

• Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Capaian : Jumlah OPD yang Menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Target : 41 OPD

Realisasi : 41 OPD

Faktor Pendukung keberhasilan program:

1. Dukungan dari pimpinan terkait pengembangan dan pemanfaatan IT;
2. Ketersediaan infrastruktur pengembangan dan pemanfaatan IT yang memadai.

Faktor Penghambat:

1. Jumlah tenaga IT yang masih terbatas;
2. Aplikasi yang terus membutuhkan pengembangan.

Solusi Penyelesaian Masalah:

1. Mengoptimalkan proses bisnis pada Dokumen Rencana Induk yang ada;
2. Mengoptimalkan tenaga IT baik jaringan maupun programmer melalui kerjasama dengan pihak ketiga;

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Capaian : Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan Pembangunan

Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik Sektoral Dalam Evaluasi Pembangunan

Target : 100%
100%

Realisasi : 100%
100%

• Kegiatan Penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Capaian : Jumlah OPD Yang Menggunakan Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan dan evaluasi Pembangunan

Target : 41 OPD

Realisasi : 41 OPD

Faktor Pendukung keberhasilan program:

1. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan OPD pengelola data/informasi statistik;
2. Penetapan shcedulle pengumpulan dan pengolahan data/informasi statistik.

Faktor Penghambat:

1. Refocusing Anggaran sebagai dampak Bencana Sosial Covid 19
2. Masih kurangnya tenaga pengolah data/informasi sektoral pada Dinas Kominfo;
3. Updating data oleh OPD yang waktunya masih bervariasi.

Solusi Penyelesaian Masalah:

1. Koordinasi dengan BPS terkait pengolahan data/informasi statistik sektoral;
2. Pertemuan rutin dengan OPD pengolah data/informasi.

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMAN INFORMASI

*Capaian : Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
Persentase Area Keamanan Informasi yang Dievaluasi*

*Target : 215 Nilai
100 %*

*Realisasi : 406 Nilai
100 %*

• Kegiatan Penyelenggaraan persandian untuk pengaman informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Capaian : Jumlah Area Keamanan Informasi Yang di Evaluasi

Target : 6 Area

Realisasi : 6 Area

Faktor Pendukung keberhasilan program:

1. Dukungan dari pemerintah pusat melalui BSSN terkait pelaksanaan program persandian;
2. Keikutsertaan aparat Dinas Kominfo dalam kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Persandian.

Faktor Penghambat:

1. Masih rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat terkait cyber dan persandian;

Solusi Penyelesaian Masalah:

2. Melakukan sosialisasi kepada aparatur daerah dan masyarakat melalui berbagai kegiatan penyebarluasan informasi baik daring maupun konten media informasi

Adapun realisasi kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

B. Kinerja Keuangan

Realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	KET
			(%)	Rp		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.858.203.400			176.640.282	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.113.600			90.300	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.733.100	99,81	47.643.800,00	89.300	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.380.500	100,00	30.379.500,00	1.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.207.150.000			175.900.210	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.207.150.000	94,52	3.031.249.790,00	175.900.210	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.274.000			86.200	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.274.000	99,76	5.187.800,00	86.200	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	319.042.000			152.522	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.800.000	98,50	1.773.000,00	27.000	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.700.000	100,00	53.700.000,00	0	

7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.200.000	98,87	10.085.000,00	115.000	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	253.342.000	100,00	253.331.478,00	10.522	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	88.248.800			328.050	
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.248.800	99,63	87.920.750,00	328.050	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.375.000			83.000	
10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	100.375.000	99,92	100.295.000,00	80.000	
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	99,99	29.997.000,00	3.000	
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	874.125.300			371.039	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	874.125.300			371.039	
12	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	314.567.000	99,97	314.459.968,00	107.032	
13	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	175.204.600	99,90	175.035.372,00	169.228	
14	Pelayanan Informasi Publik	86.972.000	99,90	86.882.021,00	89.979	
16	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	297.381.700	100,00	297.376.900,00	4.800	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.453.505.800			16.675.563	
	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.453.505.800			16.675.563	
17	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	162.948.000	99,97	162.898.000,00	50.000	

18	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	61.082.000	95,34	58.237.265,00	2.844.735	
19	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	74.127.800	99,66	73.875.318,00	252.482	
20	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1.126.058.000	98,84	1.113.003.070,00	13.054.930	
21	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	29.290.000	98,38	28.816.584,00	473.416	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	39.706.000			4.538.600	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	39.706.000			4.538.600	
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	39.706.000	88,57	35.167.400,00	4.538.600	
22	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	-	0,00	-	0	
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	70.721.500			65.920	
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70.721.500			65.920	
23	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28.964.700	99,79	28.904.260,00	60.440	

24	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	41.756.800	99,99	41.751.320,00	5.480
JUMLAH		6.296.262.000	96,85	6.097.970.596,00	198.291.404

BAB IV PENUTUP

Keberhasilan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam mencapai sebagian besar target kinerja yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari komitmen bersama seluruh pihak pelaksana, baik dari aparat Dinas Kominfo SP. itu sendiri maupun tim yang terdapat pada masing-masing SKPD teknis yang dibentuk untuk membantu pencapaian target kinerja. Selain itu juga terdapat dukungan organisasi-organisasi non pemerintah seperti, Forum Masyarakat Peduli Internet Sehat. Walaupun demikian terdapat beberapa target kinerja yang tidak tercapai, tentunya disebabkan oleh berbagai macam faktor yang telah diuraikan pada bab terdahulu.

Pencapaian target tersebut bukanlah merupakan suatu akhir dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, hal ini dikarenakan sifat dari kegiatan yang dilaksanakan yakni secara terus-menerus, mengingat perkembangan media komunikasi dan informatika yang terus mengalami kemajuan. Untuk itu beberapa langkah-langkah yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan untuk mengantisipasi kendala dalam mencapai target masa mendatang yaitu sebagai berikut :

1. Melengkapi sarana dan prasarana termasuk infrastruktur
2. Meningkatkan sumber daya aparat, baik dari segi kuantitas maupun tingkat keterampilan dan pengetahuan individu. Terutama yang berkaitan langsung dengan perangkat IT.
3. Menyusun kembali regulasi-regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, untuk lebih mempermudah dan memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Demikianlah, Laporan SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Luwu Utara tahun 2023 ini disusun oleh tim penyusun Laporan SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Luwu Utara tahun 2023, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim penyusun menyadari bahwa dalam dokumen LAKIP ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan didalamnya baik dari segi isi maupun dari segi struktur penulisan dan tata bahasa, oleh karena itu, diharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak demi penyempurnaan penyusunan Laporan SAKIP berikutnya.

Masamba, Januari 2024

TIM PENYUSUN